



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

DINAS PERTANIAN
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan ini memuat kegiatan yang telah kami lakukan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan pada tahun 2022. Laporan ini sangatlah penting untuk mengetahui capaian kegiatan, kendala dan hambatan yang di hadapi, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang. Tanpa menyebutkan satu persatu dan dengan rasa hormat yang sedalam- dalamnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun LKjIP pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

Kami menyadari LKjIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Semoga laporan ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 9 Februari 2023
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan

I Made Subagia, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660308 198903 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	13
2.1.2 Indikator Kinerja Utama	14
2.2 Program, Kegiatan dan penetapan Kinerja Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	21
3.1 Akuntabilitas Kinerja	21
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.3 Analisis Capaian Kinerja	26
3.4 Telaah Laporan Kinerja Kementerian pertanian Republik Indonesia Tahun 2021	45
3.5 Telaah Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lain (Jembrana) Tahun 2021	47
3.6 Telaah Laporan Kinerja Provinsi Bali Tahun 2021	49
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52
Lampiran A. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Pertanian Kab Tabanan	
Lampiran B. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2021	
Lampiran C. Lampiran Surat Keputusan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama	13
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2022	16
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022	25
Tabel 3.2 Hasil Perhitungan Produksi Tanaman Pangan	27
Tabel 3.3 Data Produksi Padi, Jagung, Kedelai	28
Tabel 3.4 Produksi Komoditas Perkebunan	30
Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Produktivitas Tanaman Pangan	31
Tabel 3.6 Data Series Perkembangan Padi di Kab. Tabanan	33
Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Produktivitas Komoditas Perkebunan	34
Tabel 3.8 Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2022	35
Tabel 3.9 Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022	37
Tabel 3.10 Hasil Vaksinasi Rabies di Kabupaten Tabanan Tahun 2022	38
Tabel 3.11 Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022	39
Tabel 3.12 Data Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2022 Kabupaten Tabanan	39
Tabel 3.13 Rincian Kasus Positif Rabies Tahun 2022	40
Tabel 3.14 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kabupaten Tabanan	42
Tabel 4.2 Data Populasi ternak Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kabupaten Tabanan	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Tabanan	28
Grafik 3.2 Perkembangan Produksi Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, maka sesuai UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada masa pandemi Covid 19 sektor pertanian menjadi penyelamat perekonomian nasional, saat sebagian sektor lainnya terpuruk. Menurut Data BPS, dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ekspor pertanian tumbuh 14,3 persen dengan sub sektor tanaman pangan sebagai penyumbang tertinggi dalam distribusi dan pertumbuhan ekonomi. Secara rinci berdasar sub sektornya, tanaman pangan tumbuh 3,54 persen, tanaman hortikultura 4,37 persen dan tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,33 persen. Hanya satu subsektor yaitu peternakan yang mengalami minus sebesar 0,33 persen. Optimalisasi sektor pertanian ditempuh melalui kebijakan pengembangan komoditi unggulan dengan memanfaatkan potensi peningkatan produksi,

potensi peningkatan produktivitas, potensi peningkatan mutu dan potensi pemasaran. Hal ini dimaksudkan untuk turut mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui penyediaan bahan baku industri dalam negeri, penyediaan devisa, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani serta menjaga kelestarian sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Untuk lebih meningkatkan pendapatan petani, maka prioritas pembangunan sektor pertanian diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana jalan usaha tani, peningkatan produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing, perbaikan sistem pemasaran dan pementapan pembinaan kelompok tani dalam rangka pengembangan sistem usaha agribisnis.

Dalam upaya mengembangkan sektor pertanian dimana upaya yang dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan yang berbasis komoditas unggulan dengan melibatkan langsung peran aktif kelompok tani. Pendekatan pembangunan pertanian ke depan diarahkan pada pengembangan produk dan bukan lagi pengembangan komoditas serta lebih difokuskan pada pengembangan nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustry yang berdaya saing. Permasalahan yang sering timbul antara lain penguasaan data informasi di lapangan, kelembagaan sumber daya manusia, sarana alat dan mesin pengolahan dan penguasaan teknologi pengendalian mutu hasil.

Pengembangan serta strategi pertanian kedepan adalah pengembangan yang diarahkan bagi terwujudnya sentra-sentra produksi dan terintegrasi dengan industry ikutannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan mulai dari hulu hingga ke hilir seperti: perencanaan sistem, pembinaan sistem, penyediaan peralatan dan mesin, pengolahan, modal kerja, pelatihan kerjasama kemitraan, pengendalian dan pendampingan secara berkelanjutan.

Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab,serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin. Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sangat terkait erat dengan kinerja instansi yang bersangkutan. Keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan tersebut, pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan. Selama ini pengukuran terhadap kinerja instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari proses dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, manfaat, keuntungan maupun dampak yang ditimbulkannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpijak pada konsep tersebut, maka indikator kinerja tidak saja dari aspek inputs, outputs, tapi juga sampai pada out comes, benefits dan impact dari kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pada gilirannya semua proses yang dilaksanakan untuk dinikmati masyarakat.

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja ini, pada dasarnya berupaya untuk menjawab sasaran RPJMD kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Petanian Kabupaten Tabanan. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab/kewenangan OPD, maka setiap tahun setiap opd wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sesuai instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan, yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu, perlu pula memperhatikan:

- Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing SKPD serta memuat baik keberhasilan maupun kegagalan.
- Prinsip Prioritas, yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban SKPD yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya.
- Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar

daripada biaya penyusunannya dan bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. LKjIP mencerminkan kinerja PD bersangkutan selama satu tahun anggaran yang berbasis kinerja artinya pelaksanaan kegiatannya terukur, teruji dengan sasaran yang jelas.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai tugas adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

1.3 Struktur Organisasi

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan diperlukan dukungan dana yang memadai. Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan sebagai suatu organisasi yang tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Pertanian (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008). Didasarkan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai :

- 1) perumus kebijakan di bidang pertanian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas,

dengan 1 Sub. Bagian dan 5 bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang prasarana dan sarana, yang membawahi :
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahi :
5. Bidang Perkebunan, yang membawahi :
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahi :
7. Bidang Penyuluhan
8. UPTD Dinas
9. Jabatan Fungsional

Selanjutnya Uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas:
 - Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi perizinan usaha pertanian;
 - Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyuluhan pertanian;

- Monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pertanian;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- Koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- Koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- Pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah

tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;

- Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pertanian;
- Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

.4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang sarana dan prasarana;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana

- pertanian;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan prasarana; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas:
- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - Penyusunan program kerja lingkup bidang tanaman pangan dan holtikultura;
 - Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - Pelaksanaan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain;
 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan dan holtikultura; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas:
- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perkebunan;
 - Penyusunan program kerja lingkup bidang perkebunan;
 - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten;
 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
 - Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perkebunan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh pimpinan

7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Penyusunan program kerja lingkup bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
- Pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas:

- Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang penyuluhan;

- Penyusunan program kerja lingkup bidang penyuluhan;
- Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
- Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang penyuluhan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*). Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*). Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja untuk Tahun 2022.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten
Tabanan Tahun 2022.

Lampiran-Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan beserta indikatornya untuk masing-masing Misi, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Utama

MISI Bupati dan Wakil Bupati terpilih (Misi III)	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1 Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial – ekonomi di berbagai bidang yang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD
	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Pertanian	Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunandan	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian

berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)		Peternakan	
		Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana dan sarana Pertanian
		Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi secara berkala dalam mencapai sasaran strategis organisasi, maka Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pertanian serta RPJMD Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	96%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	45%

Sumber: Renstra Dinas Pertanian

2.2 Program, Kegiatan, dan Penetapan Kinerja Tahun 2021

Di tahun 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mengelola 12 kegiatan dan 28 subkegiatan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan dalam dibawah.

Dari dana yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 serta rencana target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menetapkan target kinerja yang akan dicapai di tahun 2022.

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	
		URUSAN PERTANIAN				36,902,174,173
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Peningkatan nilai SAKIP	Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Indikator: Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			100%	29,797,308,223
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	5,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah tersusunnya dokumen renstra renja	2 Dokumen	3,000,000	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya: Jumlah tersusunnya dokumen LKjIP	1 Dokumen	2,000,000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	28,005,211,423	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	27,983,831,423	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	18,880,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator: Jumlah tersusunnya laporan keuangan	2 dokumen	2,500,000	
			Administrasi Umum Perangkat daerah Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang	100%	132,409,300	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1,103,000	

Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Tersedianya Peralatan Rumah tangga Lainnya	100%	2,217,100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	48,748,800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	4,211,200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	1,090,000
	Penyediaan Bahan/Material Indikator: Tersedianya bahan/material	100%	55,219,200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	100%	19,820,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD		100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Tersedianya jasa surat Menyurat	100%	8,625,000
	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	286,499,500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,218,315,000
Pemeliharaan		100%	70,624,000

			Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	53,324,000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	100%	17,300,000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian			10%	2,034,632,950
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pertanian Indikator: Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	50%	204,632,950
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator: Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung	10 Kec	104,632,950
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	2 jenis	40,000,000
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/ Bibit Ternak		15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1,790,000,000
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator: Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/Stek	1,790,000,000

Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan		10%	4,499,233,000
			Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	52%	989,750,000
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	1 dokumen	23,750,000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator: Persentase meningkatnya Hasil Pertanian, tersedianya Prasarana Pertanian	1 dokumen	966,000,000
			Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator: Jumlah Meningkatnya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	77 unit	3,509,483,000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator: tersedianya Prasarana Pertanian	32 unit	3,149,483,000
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator: Terbangunnya dan Terehabilitasinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	47 unit	360,000,000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Peternakan Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner		96%	350,000,000
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	8000 ekor	350,000,000
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	350,000,000
Tujuan 2: Meningkatkan	Sasaran 4: Pengembangan Sumber	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		45%	221,000,000
			Pelaksanaan	27%	221,000,000

Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Daya Manusia Pertanian Indikator: Meningkatkan Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	Penyuluhan Pertanian Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten	144 Buku	150,000,000
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten		71,000,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Akuntabilitas kinerja dapat diukur melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan penilaian kinerja akan diukur melalui penerapan sistem tersebut, sehingga hal ini dapat menggambarkan suatu sistem yang salingberkaitan antara satu sama lainnya.

Dalam upaya mewujudkan misi ke-3 bupati terpilih, setelah DPA disahkan Dinas Pertanian menyusun penetapan kinerja, sasaran strategis dan realisasi pada akhir tahun. Untuk mengetahui keberhasilan dari sasaran maka dilakukan pengukuran kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi

pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya.
Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut:

1). Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

2). Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3). Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam

bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

4). Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung.

Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Pemerintah Kabupaten. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Serta menguraikan mengenai hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sasaran pada tahun 2021 secara keseluruhan dapat tercapai. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran pada tabel 3.2

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Formula	Capaian
1.	Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemer	Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	100%	Jumlah Realisasi dibagi dengan anggaran dikalikan seratus persen	86,90%

	ntah Daerah	tugas dan fungsi PD			
2.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	10%	Produksi tahun ini dikurangi produksi tahun sebelumnya dibagi produksi tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: 6,14% Jagung: 15,47% Kedelai: 61,77%
3.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	10%	Produktivitas tahun ini dikurangi produktivitas tahun sebelumnya dibagi produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen	Padi: 7,6% Jagung: (19,1%) Kedelai: (2%)
4.	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	96%	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi Jumlah ternak dikalikan seratus persen	98,15%
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	45%	Jumlah kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dibagi total kelompok tani, subak dan subak abian yang dibina oleh penyuluh dikalikan	100%

3.3 Analisis Hasil Capaian Kinerja (per sub kegiatan)

Sasaran 2.1 Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan

Dari sasaran meningkatkan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan Peternakan, dengan indikator persentase peningkatan Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dengan menggunakan formula $\text{Produksi tahun 2022} - \text{produksi tahun 2021}$, kemudian selisih ini dibagi dengan produksi tahun 2021.

Tabel 3.2
Hasil Perhitungan Produksi Tanaman Pangan

Komoditas Pertanian	Produksi Tahun 2021 (ton)	Produksi Tahun 2022 (ton)	Persentase Peningkatan Produksi(%)
Padi	197.933	210.095	6,14
Jagung	12.713	14.680	15,47
Kedelai	395	639	61,77

Sumber: Data Diolah

Produksi padi tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan produksi padi tahun 2021. Dengan persentase peningkatan produksi sebesar 6,14%. Begitu pula dengan komoditas unggulan lainnya seperti jagung dan kedelai. Keduanya mengalami peningkatan produksi. Dimana jagung meningkat sebesar 15,47 persen dan kedelai meningkat sebesar 61,77 persen. Hal ini karena sepanjang tahun 2022 terdapat proyek tanam komoditas diluar tanaman padi seperti tanam jagung seluas 2.400 Ha. Dengan rincian:

- Kecamatan Selemadeg seluas 414 Ha,
- Kecamatan Selemadeg Timur 1.226 Ha,

- Kecamatan Kerambitan 511 Ha ,
- Kecamatan Tabanan 42 Ha,
- Kecamatan Kediri 39 Ha,
- Kecamatan Marga 53 Ha,
- Kecamatan Baturiti 115 Ha, swadaya 23 Ha.

Proyek tanam kedelai seluas 388 ha dengan rincian:

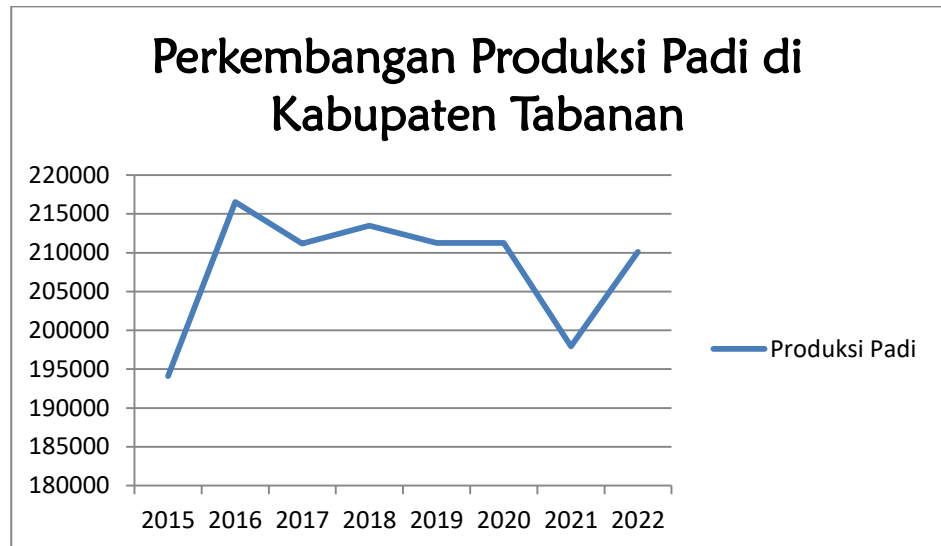
- Kecamatan Kerambitan 35 Ha,
- Kecamatan Tabanan 20 Ha,
- Kecamatan Kediri 237 Ha,
- Kecamatan Marga 13 Ha ,
- Kecamatan Baturiti 8 Ha,
- Kecamatan Penebel 75 Ha.

Tabel 3.3 Data Produksi Padi, Jagung, Kedelai

Komoditas Unggulan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Padi (ton)	194. 122	216.547	211.178	213.482	211.243	211.243	197.933	210.095
Jagung (ton)	5.035	7.369	8.691	8.901	8.691	1.440	12.713	14.680
Kedelai (ton)	679	1.280	1.107	2.411	1.896	153	395	639

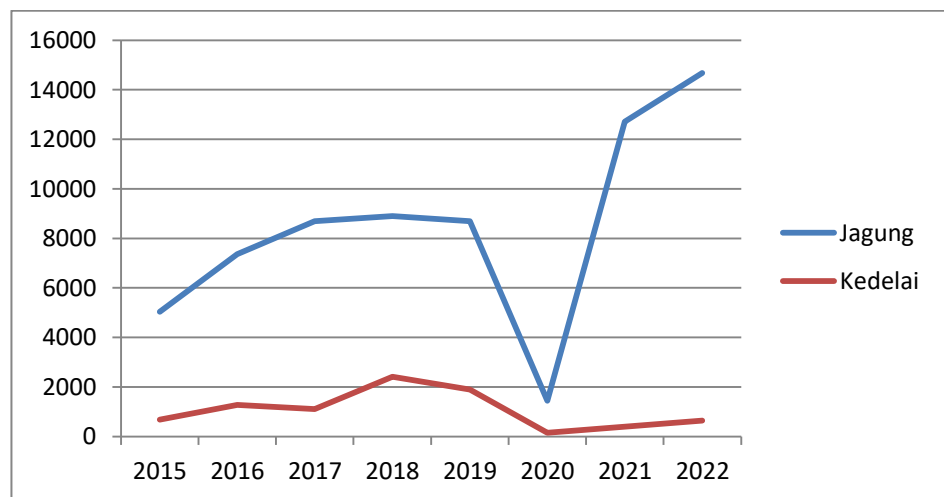
Secara umum produksi padi, jagung dan kedelai kalau dituangkan ke dalam grafik perkembangan produksi seperti grafik dibawah.

**Grafik 3.1 Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten
Tabanan**



Sumber: Data Diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Produksi Jagung dan kedelai di Kabupaten Tabanan



Sumber: Data Diolah

Untuk produksi komoditas perkebunan sesuai dengan data pada tabel dibawah

3.4 Tabel Produksi Komoditas Perkebunan

No	JENIS KOMODITAS	Luas Areal Tanaman Menghasilkan (Ha)			Produksi (Ton)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	KELAPA HYBRIDA	2.00	2.00	2.00	1.01	1.27	0.30
2	KELAPA GENJAH	330.75	330.75	342.63	243.31	244.79	251.36
3	KELAPA DALAM	12,901.00	12,901.00	12,911.50	14,935.78	14,918.66	15,165.29
4	KAKAO	3,303.87	3,303.87	3,342.97	894.17	878.70	942.06
5	KOPI ARABIKA	705.55	705.55	600.55	19.43	27.30	24.14
6	KOPI ROBUSTA	8,253.60	8,253.60	8,387.08	5,546.02	5,589.12	5,327.27
7	CENGKEH	1,825.41	1,825.41	1,854.81	437.91	163.02	145.05
8	PANILI	-	-	-	-	-	-
9	LADA	-	-	-	-	-	-
10	KEMIRI	16.20	16.20	20.74	11.04	10.34	11.04
11	PALA	11.06	11.06	38.56	2.34	8.50	8.80
12	AREN	110.11	110.11	110.11	10.08	8.63	9.45
	JUMLAH	27,459.55	27,459.55	27,610.95	22,101.09	21,850.33	21,884.76

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Secara umum produksi komoditas perkebunan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 hal ini terutama kelapa genjah, kelapa dalam, kakao, kemiri, pala dan aren. Beberapa komoditas perkebunan yang mengalami penurunan produksi antara lain kelapa hibrida, kopi Arabica, kopi robusta cengkeh dan aren.

Sasaran 2.1 Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian

Dari sasaran peningkatan prasarana dan sarana pertanian dengan indicator Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan dimana didapat dari perhitungan produktivitas tahun berlaku di kurangi produktivitas tahun sebelumnya, dibagi dengan produktivitas tahun sebelumnya dikalikan seratus persen. Dimana hasil perhitungan produktivitas

tanaman pangan sesuai dengan table dibawah

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Produktivitas Tanaman Pangan

Komoditas	Produktivitas	Produktivitas	Persentase
Pertanian	Tahun 2021 (kw/ha)	Tahun 2022	Peningkatan
			Produktivitas
Padi	53,75	57,81	(7,6%)
Jagung	72,40	58,60	(-19,1%)
Kedelai	16,21	16,53	(2%)

Sumber: Data Statistik Pertanian

Produktivitas padi dipengaruhi oleh luas tanam padi. Dimana sepanjang tahun 2022 terdapat proyek tanam komoditas diluar tanaman padi seperti tanam jagung seluas 2.400 Ha dan proyek tanam kedelai seluas 388 ha dan proyek bawang merah seluas 52 Ha. Produktivitas juga dipengaruhi oleh teknik budi daya, jarak tanam dan proses perhitungan sample ubinan, anakan per rumpun, jumlah serangan, jenis varietas, penggunaan pupuk kurang tepat.

Jagung mengalami penurunan produktivitas karena adanya perubahan standar perhitungan yang dulunya menggunakan tongkol basah, untuk tahun 2022 menggunakan satuan pipil kering. Hal ini karena adanya permintaan dari Dinas Pertanian Provinsi Bali untuk menyamakan satuan ke pipil kering untuk memudahkan perhitungan.

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung. Komoditas ini memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan yang kaya protein nabati dan sebagai bahan baku industri pakan ternak. Selain sebagai sumber protein nabati, kedelai merupakan

sumber lemak, mineral, dan vitamin serta dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti tahu, tempe, tauco, kecap, dan susu. Untuk produktivitas komoditas kedelai, produktivitas mengalami peningkatan karena adanya bantuan pemerintah, penggunaan benih bermutu, pembuatan saluran drainase, pengaturan populasi, pengendalian OPT, pengolahan lahan yang baik dan pemupukan sesuai kebutuhan.

Tabel 3.6
Data Series Perkembangan Padi di Kab. Tabanan

No	URAIAN	Tahun													
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	L. Tanam (Ha)	42.075	44.701	41.411	40.916	42.827	32.600	33.040	46.084	37.386	36.855	34.783	37.075	37.882	33.091
	L Panen Bersih	40.535	41.637	40.789	39.415	41.612	36.892	32.374	39.603	36.809	36.840	37.266	33.065	36.864	34.903
	Produktivitas (Ku/Ha)	59,78	56,10	52,09	56, 49	56,16	58,07	59,96	56,10	57,37	58,04	55,81	64.24	53,75	57,81
	Produksi (Ton)	242.298	233.602	212.481	222.659	233.690	214.203	194.122	216.547	211.178	213.482	211.243	211.243	197.933	210.095
2	Produksi Beras	106.041	102.235	107.629	112.665	118.251	111.394,10	104.766	115.249	113.969	113.405	112.216	112.784	105,177	112.000
	Kebutuhan Beras (Ton)	60.065	60.450	61.978	63.052	63.271	56.322	49.700	49.700	50.281	50.281	50.281	50.817	51.421	51.000
	Surplus Beras	45.976	41.785	45.651	49.613	54.980	49.440	48.451	58.770	56.870	58.096	56.906	56.885	48.614	55.773

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Untuk persentase peningkatan produktivitas hasil perkebunan dengan menggunakan formula produktivitas tahun 2022 dikurangi produktivitas 2021, kemudian selisih ini dibagi dengan produktivitas tahun 2021.

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan Produktivitas Komoditas Perkebunan

No	JENIS KOMODITA	PRODUKTIVITAS			Persentase Peningkatan Produktivitas
		2020	2021	2022	
1	KELAPA	505	635	150	(-76,4)
2	KELAPA GENJAH	736	740	734	(-0,8)
3	KELAPA DALAM	1.15	1.19	1.17	(-1,9)
4	KAKAO	271	274	282	2,92
5	KOPI ARABIKA	28	27	40	48,15
6	KOPI ROBUSTA	667	690	635	(-7,97)
7	CENGKEH	11	147	78	(-46,9)
8	PANILI	0	0	0	
9	LADA	0	0	0	
10	KEMIRI	554	554	532	(-3,97)
11	PALA	212	212	228	0,00
12	AREN	44	92	86	72,72

Sumber: Statistik Dinas Pertanian

Dari tabel dapat dilihat bahwa hampir semua produktivitas komoditas perkebunan mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang kurang mendukung, kualitas bibit yang rendah serta kurangnya penggunaan pupuk. Hanya komoditas kopi arabika dan aren yang produktivitasnya mengalami peningkatan. Bahkan kopi arabika peningkatan produktivitasnya jauh melebihi tahun sebelumnya. Kakao mengalami peningkatan produktivitas, namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan, hal ini karena iklim yang tidak mendukung, dan adanya anomaly iklim. Pengendalian OPT dilakukan secara swadaya. Belum adanya petugas pengamat OPT di kabupaten. Pengendalian OPT masih ditangani oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali. Upaya yang

telah dilakukan antara lain dengan mengusulkan kegiatan untuk peremajaan komoditi perkebunan utamanya kopi secara berkelanjutan. Permasalahan yang dialami terkait dengan rendahnya produktivitas tanaman yang masih rendah antara lain pemangkasan belum intensif, pengendalian OPT belum optimal, sanitasi kebun belum optimal, pemupukan belum maksimal, tanaman sudah tua dan kurang peremajaan. Langkah-langkah pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Tabanan antara lain:

- Peremajaan dan intensifikasi tanaman kakao
- Pengawalan dan pendampingan
- Pengendalian OPT dan penerapan PHT
- Pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan
- Indikasi geografis
- Pemberdayaan petugas pengamat OPT
- Agroindustri komoditi kakao
- Pemasaran, akses pasar, dan pelayanan informasi pasar
- Pembinaan usaha komoditi kakao
- Sistem jaminan mutu
- Melakukan promosi

Tabel 3.8 Distribusi Pupuk Bersubsidi Tahun 2022

No	Kecamatan	Urea				NPK			
		Alokasi	Realisasi	Sisa	% Real	Alokasi	Realisasi	Sisa	% Real
1	Selemadeg Barat	305.000	295.200	9.800	96.79	508.000	508.000	-	100.00
2	Selemadeg	520.000	519.650	0.350	99.93	476.400	476.400	-	100.00
3	Selemadeg Timur	713.000	683.450	29.550	95.86	953.242	953.242	-	100.00
4	Kerambitan	880.000	837.530	42.470	95.17	911.760	911.604	0.156	99.98
5	Tabanan	970.000	859.033	110.967	88.56	804.266	804.263	0.003	100.00

6	Kediri	1,200.000	1,131.627	68.373	94.30	1,154.882	1,154.876	0.006	100.00
7	Marga	644.000	642.600	1.400	99.78	651.550	650.638	0.912	99.86
8	Baturiti	610.000	608.150	1.850	99.70	448.300	447.450	0.850	99.81
9	Penebel	1,308.000	1,278.500	29.500	97.74	998.000	998.000	-	100.00
10	Pupuan	250.000	242.650	7.350	97.06	1,073.600	1,073.100	0.500	99.95
	Jumlah :	7,400.000	7,098.390	301.610	95.92	7,980.000	7,977.573	2.427	99.97

No	Kecamatan	Organik Granule			
		Alokasi	Realisasi		% Real
1	Selemadeg Barat	67.00	66.08		98.63
2	Selemadeg	-	-		#DIV/0!
3	Selemadeg Timur	-	-		#DIV/0!
4	Kerambitan	2.00	2.00		100.00
5	Tabanan	15.00	15.00		100.00
6	Kediri	58.00	58.00		100.00
7	Marga	5.00	5.00		100.00
8	Baturiti	6.00	6.00		100.00
9	Penebel	-	-		#DIV/0!
10	Pupuan	27.00	26.16		96.89
	Jumlah :	180.00	178.24		99.02

Berdasarkan data pada table diatas maka dapat diamati bahwa sepanjang tahun 2022, pupuk kimia yang disalurkan sebanyak 15.380.000, sedangkan pupuk organik yang disalurkan sebanyak 180

Pembangunan prasarana yang dilakukan sepanjang tahun 2022 yakni sesuai table dibawah:

Tabel 3.9 Pembangunan Prasarana Pertanian Tahun 2022

No	Jenis Prasarana	Jumlah Pembangunan
1	Pembangunan Irigasi Tanah Dalam (Satker Tanaman Pangan)	1 paket
2	Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal (Satker Tanaman Pangan)	1 paket
3	Pembangunan Jalan Usaha Tanaman Pangan	1 paket
4	Pembangunan Jalan Produksi Hortikultura	1 paket
5	Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan	1 paket
6	Pembangunan Jalan Produksi Peternakan	1 paket
7	Bangunan RMU	1 paket
8	UV rayer(min 2 ton/proses, min ukuran 20mx8	1 paket
9	RMU Kapasitas 1-1,5 ton/jam (Kapasitas pengumpanan min 1 ton/jam)	1 paket
10	Colour Sorter (Kapasitas Pengumpanan min 500 kg/jam)	1 paket
11	Combine Harvester Besar/ Combine Harvester Multifungsi (Daya Min 31 Kw)	1 paket

Sasaran 2.3 Meningkatkan Produktivitas Peternakan

Dari sasaran Meningkatkan Produktivitas Peternakan dengan indikator persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. Dalam hal pelayanan kesehatan hewan selain dilakukan vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan, juga dilakukan pemberian obat-obatan untuk ternak sapi di kelompok ternak serta melakukan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku. Munculnya penyakit kuku dan mulut pada bulan Juli 2022 sehingga perlu dilakukan kegiatan pencegahan, pengendalian dan

penanggulangan. Arahan dari menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dan Satgas PMK bahwa sebelum pelaksanaan G20 tanggal 13 November 2022 pelaksanaan cakupan vaksinasi PMK sudah mencapai 80% pada hewan rentan PMK (sapi, kerbau, kambing dan babi).

Rabies adalah salah satu penyakit yang bersifat zoonosis atau dalam kata lain bisa menular dari hewan ke manusia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Tak hanya menyerang anjing, tetapi mamalia berdarah panas juga memiliki risiko tinggi dalam penularan penyakit rabies ini. Rabies ini bisa menyerang hewan sejak lahir. Maka dari itu, perlu dilakukan vaksinasi rabies sejak dini demi mencegah terjangkitnya virus tersebut bagi para hewan peliharaan. Tingkat efektivitas vaksin rabies ini 100%, sehingga sangat penting dilakukan sebagai langkah awal pencegahan rabies.

Tabel 3.10 Hasil Vaksinasi Rabies di Kabupaten Tabanan Tahun 2022

KECAMATAN	POPULASI ANJING	HASIL VAKSINASI				Cakupan (%)
		ANJING	KUCING	MONYET	TOTAL VAKSINASI	
Baturiti	6674	0	0	0	0	0,00
Kediri	10485	0	0	0	0	0,00
Kerambitan	7120	0	0	0	0	0,00
Marga	5818	902	0	0	902	15,50
Penebel	7385	0	0	0	0	0,00
Pupuan	7766	119	0	0	119	1,53
Selemadeg	5415	123	0	0	123	2,27
Selemadeg Barat	6879	169	0	0	169	2,46

Selemadeg Timur	4600	182	0	0	182	3,96
Tabanan	8765	0	0	0	0	0,00
TOTAL	70.907	1.495	0	0	1.495	2,11

Sumber: Statistik Peternakan

3.11 Pelayanan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Keterangan	Jumlah Vaksinasi (ekor)
Pelayanan kesehatan hewan dan spraying	1.534
Vaksinasi Sapi	39.509
Vaksinasi Babi	26.888
Vaksinasi kambing	523
Vaksinasi Rabies	1.495
Total Pelayanan kesehatan Hewan	69.949 ekor
Total Populasi Ternak	71.262 ekor
Persentase pelayanan Kesehatan Hewan	98,16%

Sumber: Statistik Peternakan

Tabel 3.12 Data Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2022 Kabupaten Tabanan

NO	JENIS TERNAK	PERKEMBANGAN POPULASI		KETERANGAN NAIK/TURUN %
		2021 ekor	2022 ekor	
1	Sapi	39.329	38.729	Turun 1,5 %
2	Kerbau	59	49	Turun 20,4 %
3	Kuda	11	0	Turun 100 %
4	Babi	22.681	44.304	Naik 48.8 %
5	Kambing	1.754	4.296	Naik 59,2 %

6	Ayam Buras	284.393	261.613	Turun 8,7 %
7	Ayam Ras Petelur	852.863	836.200	Turun 1,9 %
8	Ayam Ras Pedaging	2.144.908	2.224.683	Naik 3,6 %
9	Itik	57.111	51.255	Turun 11,4%

Sumber: Statistik Peternakan

Tabel 3.13 Rincian Kasus Positif Rabies Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa	Spesies	Tanggal Kasus
1	Pupuan	Pajahan	Anjing	07/01/2023
2	Selemadeg	Antap	Anjing	07/01/2023
3	Tabanan	Sudimara	Anjing	16/01/2023

Sumber: Statistik Peternakan

Secara umum faktor yang dirasa menghambat antara lain:

- Masih adanya pemilik anjing yang tidak mau memberikan anjingnya untuk diambil sampelnya walaupun anjing yang menggigit beresiko tinggi, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyakit rabies.
- Semua depo obat hewan belum memiliki rekomendasi ijin dari dinas teknis dan obat yang dijual masih ada yang kadaluarsa sehingga perlu ditertibkan lagi.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan sehingga keinginan untuk melakukan upaya pencegahan dan sanitasi kandang masih rendah.
- Dari hasil pemantauan dan pengawasan di tempat pemotongan diluar RPH ditemukan pembuangan limbah ke sungai dan tidak ada tempat penampungan limbah.

Upaya yang ditempuh antara lain:

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan

dampak penyakit rabies perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan dengan melibatkan jajaran dinas dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan.

2. Perlu dilakukan penertiban terhadap penjual obat hewan yang tidak memiliki ijin dari dinas teknis dan memasarkan obat yang kadaluarsa.
3. Untuk menumbuhkan kesadaran peternak tentang pentingnya kesehatan hewan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peternak tentang kesehatan hewan perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi secara terus-menerus baik melalui jalur formal maupun informal.
4. Pemotongan babi diluar RPH belum mempunyai penampungan limbah, disarankan untuk melakukan pemotongan di RPH sesuai dengan Perbub. Nomor 67 Tahun 2013.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Dinas Pertanian melalui bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan pangan asal hewan. Pemeriksaan ini mengeluarkan sertifikat Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Tahun 2022 jumlah SKKH yang dikeluarkan dapat dilihat dari tabel:

Tabel 3.14 Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kabupaten Tabanan

NO	TAHUN	JUMLAH SKKH	JUMLAH BAP	KETERANGAN
1	Jumlah 2022	8	268	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku, Daging olahan
2	Jumlah 2021	0	263	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku,Daging olahan
3	Jumlah 2020	71 6	11 0	Komoditi DOC,Ayam Apkir, Daging Beku, Daging olahan

Diharapkan dengan pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner meningkatkan derajat hewan di Kabupaten Tabanan.

Tabel 4.2 Data Populasi ternak Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kabupaten Tabanan

NO	JENIS TERNAK	PERKEMBANGAN POPULASI		KETERANGAN NAIK/TURUN %
		2021 ekor	2022 ekor	
1	Sapi	39.329	38.729	Turun 1,5 %
2	Kerbau	59	49	Turun 20,4 %
3	Kuda	11	0	Turun 100 %
4	Babi	22.681	44.304	Naik 48.8 %
5	Kambing	1.754	4.296	Naik 59,2 %
6	Ayam Buras	284.393	261.613	Turun 8,7 %
7	Ayam Ras Petelur	852.863	836.200	Turun 1,9 %

8	Ayam Ras Pedaging	2.144.908	2.224.683	Naik 3,6 %
9	Itik	57.111	51.255	Turun 11,4%

Sumber: Statistik Peternakan

Beberapa Alasan Penurunan populasi ternak antara lain:

Ternak Sapi

Alasan Penurunan populasinya pada tahun 2022 disebabkan beberapa

Hal :

- Menurunnya minat petani peternak untuk memelihara ternak sapi.
- Beralihnya minat peternak sapi ke buruh bangunan karena pengasilan beternak sapi belum bisa menunjang pendapatan sehari hari karena tuntutan biaya hidup pada saat ini sangatlah besar
- Tidak adanya minat pemuda untuk terjun beternak sapi pada saat ini lebih banyak terjun bekerja kesektor lain.
- Adanya larangan penggunaan lahan inpestor di daerah daerah pesisir untuk digunakan untuk beternak sapi.
- Masih adanya penyakit PMK yang menyerang ternak sapi.

Ternak Kerbau

- Belum populernya peternakan kerbau dikabupaten tabanan disamping harga bibit jauh lebih mahal dari sapi.Daging kerbau dikabupaten tabanan dipergunakan untuk upacara agama saja.
- Belum populernya konsumsi daging kerbau dikabupaten tabanan hanya baru di beberapa desa di kabupaten tabanan.
- Masih ada penyakit PMK yang menyrang kerbau.

Ternak Ayam Petelur

- Adanya penurunan populasi pemeliharaan oleh peternak karena disebabkan harga pakan yang cenderung meningkat mahal dibandingkan harga telur.Sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak.

- Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak Ayam Ras Petelur Ke sektor lain yg menunjang pendapatan sehari hari.

Ternak Ayam Buras

- Adanya penurunan populasi pemeliharaan oleh peternak karena disebabkan harga pakan yang cenderung meningkat mahal dibandingkan harga berat hidup ayam. Sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak.
- Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak Ayam Buras Ke sektor lain yg menunjang pendapatan sehari hari.

Ternak itik

Adanya penurunan populasi pemeliharaan oleh peternak karena disebabkan harga pakan yang cenderung meningkat mahal dibandingkan harga berat hidup Itik. Sehingga berpengaruh pada pendapatan peternak.

Pemeliharaan itik bersekala besar tidak ada lagi karena memerlukan lahan luas dan bau masih menjadi permasalahan besar bagi peternak.

Adanya beberapa peternak yang beralih pemeliharaan dari beternak Itik Ke sektor lain yg menunjang pendapatan sehari hari.

Ternak Kuda

Adanya penurunan populasi kuda disebabkan karena tidak populernya beternak kuda di masyarakat dan biaya yang diperlukan cukup tinggi.

Sasaran 2.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Perwujudan sasaran ini adalah Pengembangan kapasitas petani dan kelembagaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Tabanan. Kapasitas petani dapat meningkat sejalan dengan partisipasi mereka

dalam kelembagaan petani. Tahun 2022 penyuluh membina seluruh subak sawah, subak abian, kelompok tani, kelompok tani ternak, kelompok wanita tani, gapoktan dan forum poktan dengan jumlah 236 subak sawah, 186 subak abian, 1.682 kelompok tani, 596 kelompok tani ternak, 72 Kelompok Wanita Tani, 254 gapoktan dan 20 forum poktan, Rata-rata penyuluh membina poktan 18 poktan yang aktif (kisaran 16-20 poktan) Setiap penyuluh membina secara intensif 8 poktan untuk peningkatan kelas kemampuan kelompok (kisaran 5-10 poktan, ketentuan dari kemenpan) sehingga diperoleh target 8/18 dikalikan 100% = 44,44% dibulatkan menjadi 45%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 45% sehingga persentase ketercapaian mencapai 100 persen.

Kapasitas petani dan partisipasi mereka dalam kelembagaan petani akan mendorong kapasitas kelembagaan menjadi lebih efektif. Perwujudan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun 2022 secara fisik tercapai 100% dan keuangan tercapai 97 %. Hal ini dapat tercapai karena Terlaksananya kegiatan penyuluh yang tepat guna, tersusunnya Programa Tk. Desa, Tk. Kecamatan dan Tk. Kabupaten, Terlaksananya demplot pupuk hayati cair, untuk meningkatkan hasil petani yang berdampak pada penghasilan petani, untuk meningkatkan kualitas data kelembagaan penyuluh melalui paket data, dan mampu mendukung kegiatan operasional penyuluh yang ada di Kabupaten Tabanan.

Kelembagaan kelompok petani merupakan sarana sekaligus sasaran penyuluhan pertanian sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Berkaitan dengan situasi ini, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok petani memerlukan komitmen bagi kelembagaan penyuluhan, terutama kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, untuk melaksanakan tugas yang semestinya. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan salah satu wadah organisasi yang terdapat dalam Dinas Pertanian. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian adalah sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumberdaya manusia pertanian serta

menyelenggarakan penyuluhan.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPPK), kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat desa adalah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu petani agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. dari sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa tercapai 100 % dan realisasi keuangan tercapai 97,84 % karena Terseleksinya kelembagaan petani, Gapoktan, KEP dan mendorong penerapan teknologi petani secara berkelanjutan dan meningkatkan teknologi kelembagaan petani sehingga tersusunnya program Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani, melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan agar petani mampu menjadi wirausaha yang berprestasi, Terlaksananya penilaian kelembagaan petani secara berjenjang di Tingkat desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten, Terlaksananya seleksi Kelembagaan Ekonomi Petani, Poktan dan Gapoktan dan tercapainya target 1 juara tingkat Kabupaten mewakili ke untuk tingkat Propinsi Untuk Tahun 2022.

3.4 Telaah Laporan Kinerja Kementerian pertanian Republik Indonesia Tahun 2021

Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan target kinerja yang ingin dicapai sebagai ukuran dalam upaya pembangunan pertanian pada tahun 2021, yaitu:

- Meningkatnya ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas,
- Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian,

- Meningkatnya pemanfaatan eknologi dan inovasi pertanian,
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dan
- Terwujudnya birokrasi. Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien serta anggaran yang akuntabel. Sebagai langkah implementasinya, Kementerian Pertanian telah menetapkan tiga belas kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, meliputi:
 - Peningkatan produktivitas dan produksi (indeks pertanaman/IP dan ekstensifikasi)
 - Pengembangan pangan lokal,
 - Pengembangan lumbung pangan,
 - Pengembangan pertanian presisi dan Smart Farming,
 - Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor (2020-2024),
 - Peningkatan hilirisasi/industri produk pertanian,
 - Pengembangan pertanian modern,
 - Penciptaan dan pengembangan varietas unggul,
 - Penciptaan dan pengembangan inovasi teknologi breeding, pasca panen, pengolahan dan inovasi pasar,
 - Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian,
 - Penguatan kapasitas kelembagaan petani,
 - Pengembangan AWR (Digitalisasi, IoT, AI, Robot Construction), dan
 - Pelaksanaan reformasi birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah dan kawasan komoditas strategis, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan menuju terbentuknya korporasi petani, dan sinergi antar stakeholder di pusat maupun di daerah. Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain:
 - Produksi padi tahun 2021 mencapai 55,27 juta ton meningkat 1,14% dari tahun 2020;
 - Produksi cabai tahun 2021 mencapai 2,83 juta ton meningkat 1,82% dari tahun 2020,

- Produksi bawang merah tahun 2021 mencapai 1,94 juta ton meningkat 7,02% dari tahun 2020, dan
- Produksi aneka daging tahun 2021 mencapai 4,4 juta ton meningkat 5,59%. Produksi jagung pada tahun 2021 (dengan kadar air 27%) mencapai 23,04 juta ton yang dihitung berdasarkan angka produktivitas tahun 2020 BPS dan Luas panen 2021 PDPS. Produksi tahun 2021 mengalami kenaikan 122,76 ton atau 0,54% terhadap produksi jagung 2020. Perkembangan produksi jagung Tahun 2017-2021 menunjukkan ada pertumbuhan setiap tahunnya, kecuali tahun 2018 yang terdapat koreksi angka dari BPS. Gambar 6 memperlihatkan bahwa produktivitas dan luas panen jagung juga mengalami fluktuasi selama 2017-2021. Faktor pendukung peningkatan produksi jagung:
 - Meningkatnya motivasi petani untuk menanam jagung karena harga yang menguntungkan di tingkat petani, harga jagung dengan kadar air 27% saat ini Rp2.800,00 menjadi Rp4.500,00, sedangkan untuk kadar air 14-15% dari Rp3.500,00 menjadi Rp5.500,00
 - Iklim yang mendukung, sehingga tidak ada pergeseran tanam.
 - Harga jagung internasional tinggi akibat pandemi Covid-19, sehingga konsumen/pabrik pakan/peternak lebih memanfaatkan jagung dalam negeri. Produksi benih jagung stabil, dengan adanya pembinaan BBI jagung terutama untuk benih komposit.
 - Penggunaan dryer secara maksimal sehingga meningkatkan daya simpan jagung. Meskipun produksi jagung meningkat dari tahun sebelumnya, namun dari segi produktivitas terjadi penurunan, hal ini disebabkan oleh penambahan areal tanam baru seluas 390.000 ha yang belum mampu menghasilkan produktivitas Maksimal

3.5 Telaah Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lain (Jembrana) Tahun 2021

Tahun 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Jembrana memiliki tiga program. Program tersebut antara lain Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana

Pertanian, dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Capaian program-program tersebut yakni:

Program Pengawasan Keamanan Pangan melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan dana APBD Kabupaten Jemberana sebesar Rp. 25.437.200 ,- dengan realisasi sampai bulan Desember 2021 sebesar 96,82 % atau Rp. 24.629.900,- dengan realisasi fisik 100%. Bentuk kegiatan ini berupa pengujian sample berupa pangan segar asal tumbuhan berlokasi di Pasar se Kabupaten Jemberana yang mana hasil kegiatan ini untuk mengetahui kelayakan pangan segar asal tumbuhan untuk dikonsumsi serta terlaksananya pengawasan /survey pasar dalam rangka keamanan pangan segar yang berlokasi di pasar se Kabupaten Jemberana.

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Kabupaten Jemberana didukung dengan dana APBD Kabupaten Jemberana sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi sampai bulan Desember 2021 sebesar 87,20 % atau Rp. 13.080.500,-dengan realisasi fisik 100%.Kegiatan ini berupa pemantauan Peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga dan tepat mutu. Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida kabupaten Jemberana yang beranggotakan dari Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Jemberana dan instansi terkait lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian dan TNI.

Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain didukung dengan dana APBD Kabupaten Jemberana sebesar Rp. 4.994.515.900 – dengan realisasi sampai bulan Desember 2021 sebesar 97,36 % atau Rp. 4.862.596.072, dengan realisasi fisik 100 %, bentuk kegiatan ini terlaksananya pengembangan tanaman padi seluas 200 Ha, pengembangan padi berupa bibit padi Inhibrida sebanyak 6.000 kg dan pupuk pelengkap cair sebanyak 1.000 liter,

Bibit Durian 500 pohon, Selain kegiatan diatas juga dilaksanakan Pengembangan Perbinihan/perbibitan. Kabupaten Jembrana adalah pengembangan benih padi unggul seluas 160 are , ,pengadaan obat-obatan ternak sapi 1 paket untuk kebutuhan 1 tahun dan Pengadaan bahan pakan ternak berupa Hijauam Makanan Ternak 148.374 kg, dan dedak padi sebanyak 11.002 kg, yang merupakan kebutuhan selama 1 tahun yang berlokasi di ATP Melaya, sehingga berkembangnya system pertanian terpadu/terintegrasi.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui satu kegiatan yaitu Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Bentuk kegiatan ini antara lain, terlaksananya pembangunan jalan usaha tani sebesar 3 km pada subak Tegal Gintungan, Subak Yehbuah dan Subak Yehembang , Pembangunan Dam Parit 3 paket pada subak Manistutu Barat, Subak Pk.Jelepung I dan Subak Pk.Jelepung II, pelemiharaan Bagunan Gedung BPP Kecamatan Negara 1 paket dan Irigasi air tanah dan lumbung pangan sebanyak 11 unit untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan intensitas pertanaman pada lahan sawah petani, khususnya dalam penyediaan supplay air irigasi.

3.6 Telaah Laporan Kinerja Provinsi Bali Tahun 2021

Capaian kinerja tahun 2021 pada komponen peningkatan IKP lebih dari 80% dengan target 80% mengalami kenaikan 105,58% dari tahun 2020. Pada komponen peningkatan jumlah produksi tanaman pangan mengalami penurunan produksi sebesar 786.101 ton atau 93,18%. Pada komponen jumlah peningkatan produksi tanaman hortikultura mengalami kenaikan sebesar 114,47% atau 115.970 ton dari target 101.805 ton, komponen jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan mengalami penurunan sebesar 98,94% atau 94.119 ton dari target 94.646 ton, komponen jumlah populasi ternak lokal bali (ternak) mengalami kenaikan populasi dari target 446.893 ekor, komponen jumlah kasus sakit hewan menular strategis dan zoonosis (kasus rabies dan flu burung) mengalami peningkatan kasus

rabies sebesar 221 kasus dari target 100 kasus. Penurunan produksi disebabkan oleh :

- Adanya alih fungsi lahan sawah dan adanya perbaikan jaringan irigasi
- Terjadi pengalihan komoditi tanaman dari padi, jagung atau kedelai ke jenis tanaman yang lebih menguntungkan seperti jagung manis, semangka dan sayuran dataran rendah.
- Anomali iklim, dimana curah hujan yang kurang menyebabkan produksi komoditi sayuran berkurang.
- Adanya pandemic Covid -19
- Terjadinya penjualan ternak yang tidak disertai dengan penambahan bibit baru diakibatkan daya beli kurang.

Untuk Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali tercatat 93,40 pada bulan Oktober 2021, naik 0,43 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang tercatat 93,00. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya indeks yang diterima petani (It) sebesar 0,61 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,18 persen. It tercatat meningkat dari 99,95 menjadi 100,56 pada bulan Oktober 2021. Sedangkan Ib tercatat naik dari 107,48 menjadi 107,67. NTP Provinsi Bali pada bulan Oktober 2021 masih berada di bawah angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tingkatan tertentu nilai tukar produk yang dihasilkan petani belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani, yang terdiri atas dua hal pokok, yaitu konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertaniannya. Dari 5 subsektor yang menjadi komponen penyusunan indeks NTP, hanya subsektor perikanan yang mampu mencapai angka 100 di bulan Oktober 2021.

Realisasi anggaran tahun 2021 dari segi keuangan rata-rata sudah mendekati 100 %. Hanya kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah

Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah

Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Penjaminan Kesehatan Hewan dengan realisasi kurang. Hal ini terjadi karena keterlambatan PPTK dalam menerima DPA Perubahan yakni pada bulan November minggu ke dua. Oleh karena itu tidak memungkinkan untuk melakukan pengadaan belanja bahan dan obat-obatan mengingat waktu yang singkat dan juga tidak memungkinkan menggunakan bahan dan obat tersebut untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan kepada kelompok ternak sasaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menyajikan keberhasilan dan kegagalan yang di tahun 2022. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- b. Hasil kinerja program yang tercermin dalam IKU, secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan, namun ada juga sasaran yang tidak dapat tercapai namun tetap mengalami peningkatan.
- c. Hasil kinerja keuangan, capaian sasaran secara umum telah mampu mendekati seratus persen. Sisanya tidak diamprah karena efisiensi.

4.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja diatas, maka ada beberapasarana-saran yang perlu disampaikan yaitu:

1. Dalam penyusunan rencana kerja hendaknya selalu berpedoman kepadaperencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Perlu ditingkatkan kompetensi aparat (kualitas SDM) Dinas Pertanian untukmencapai prioritas sasaran berdasarkan Renstra.
3. Perlu selalu ditingkatkan sinkronisasi koordinasi dan kerja sama baik levelhorizontal maupun vertikal.
4. Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana untuk kelancaran administrasi dankinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan.
5. Kebijakan yang dapat diambil antara lain:

- Meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan pertanian,
- Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian. Pengembangan sarana dan prasarana pertanian serta infrastruktur pertanian.
- Penguatan petugas pengendalian organisme pengganggu tanaman (POPT).
- Meningkatkan promosi dan pengembangan kualitas komoditas pertanian.
- Menyediakan benih unggul bermutu bagi petani pelaku usaha perkebunan.
- Menentukan kawasan agrobisnis peternakan yang potensial untuk dikembangkan.
- Sosialisasi bahaya penyakit hewan menular dan zoonosis.
- Peningkatan jumlah petugas respon cepat tentang penanggulangan penyakit zoonosis

Akhir kata semoga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan untuk tahun berikutnya.

Lampiran 1. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Pertanian Kab Tabanan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD
		URUSAN PERTANIAN				40,26 2,336, 447		38,596 ,687,0 73		36,5 24,4 29,8 20		37,855, 866,776		38,985 ,364,9 48		40,148 ,814,1 73		
Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Peningkatan nilai SAKIP	Sasaran 1: Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Indikator: Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Terselenggaranya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD			100%	35,93 2,259 ,947	100%	31,164 ,187,2 23	100%	31,0 86,6 76,6 88	100%	31,582, 941,27 0	100%	32,252 ,939,5 17	100%	33,101 ,336,4 16		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	7,000,000	100%	8,000,000	100%	9,000,000	100%	10,000,000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator: Jumlah tersusunnya dokumen renstra renja		2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	4,000,000	2 Dokumen	4,500,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,500,000		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikatornya : Jumlah tersusunnya dokumen LKjIP	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,500,000	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	33,471,659,862	100%	29,005,211,423	100%	28,954,004,008	100%	29,030,645,179	100%	29,532,031,849	100%	30,384,817,721
Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator: Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	33,444,270,786	100%	28,977,711,423	100%	28,925,129,008	100%	29,000,326,429	100%	29,500,197,161	100%	30,351,391,299
Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Indikator: Persentase terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	21,000,000	100%	22,050,000	100%	23,152,500	100%	24,310,125

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDIndikator: Jumlah tersusunnya laporan keuangan	2 dokumen	7,389,076	2 dokumen	7,500,000	2 dokumen	7,875,000	2 dokumen	8,268,750	2 dokumen	8,682,188	2 dokumen	9,116,297
Administrasi Umum Perangkat daerah		100%	192,19,010	100%	227,152,200	100%	302,562,460	100%	324,707,593	100%	341,927,488	100%	359,023,863
Indikator: Persentase terselenggaranya administrasi umum Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	5,000,000	100%	2,223,000		2,334,150		2,450,858		2,573,400		2,702,070

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator: Tersedianya Peralatan Rumah tangga Lainnya	100%	6,000,000	100%	4,444,700	100%	4,666,935	100%	4,900,282	100%	5,145,296	100%	5,402,561
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100%	61,626,500	100%	50,000,000	100%	55,950,000	100%	58,747,500	100%	61,684,875	100%	64,769,119
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator: Persentase administrasi perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	8,428,000	100%	8,425,000	100%	11,849,900	100%	12,442,395	100%	13,064,515	100%	13,717,740

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	2,160,000	100%	1,980,000	100%	3,300,000	100%	3,465,000	100%	3,638,250	100%	3,820,163
			Penyediaan Bahan/Material Indikator: Tersedianya bahan/material	100%	50,439,510	100%	110,439,500	100%	115,961,475	100%	121,759,549	100%	127,847,526	100%	134,239,902
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah	100%	58,465,000	100%	39,640,000	100%	98,000,000	100%	102,900,000	100%	108,045,000	100%	113,447,250

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator: Terpeliharaan arsip pada SKPD	0	0	100%	10,000,000	100%	10,500,000	100%	18,042,010	100%	19,928,626	100%	20,925,057
Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	575,705,175	100%	238,378,500	100%	50,442,865	100%	257,500,000	100%	325,110,451	100%	156,680,908
Penunjang Urusan Pemerintah daerah Indikator: Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Terpeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	575,705,175	100%	238,378,500	100%	50,442,865	100%	257,500,000	100%	325,110,451	100%	156,680,908
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1,546,524,400	100%	1,547,503,900	100%	1,624,879,095	100%	1,706,123,050	100%	1,791,598,786	100%	1,881,178,725
Indikator: Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator: Tersedianya jasa surat Menyurat	100%	8,625,000	100%	8,625,000	100%	9,056,250	100%	9,509,063	100%	10,154,099	100%	10,661,804

	yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Indikator: Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	286,495,000	100%	286,499,500	100%	300,824,475	100%	315,865,699	100%	331,658,984	100%	348,241,933
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,251,404,400	100%	1,252,379,400	100%	1,314,998,370	100%	1,380,748,289	100%	1,449,785,703	100%	1,522,274,988
		Pemeliharaan Barang	100%	141,251,500	100%	140,941,200	100%	147,988,260	100%	255,965,448	100%	253,270,943	100%	309,635,200

			Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator: Persentase Terpeliharanya Barang Milik daerah Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kencaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator: Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	106,661,500	100%	106,651,200	100%	111,983,760	100%	117,582,948	100%	123,462,095	100%	129,635,200
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator: Tersedianya Peralatan Mesin Lainnya	100%	34,590,000	100%	34,290,000	100%	36,004,500	100%	138,382,500	100%	129,808,848	100%	180,000,000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian	Sasaran 1: Meningkatkan Produktivitas hasil pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANI			10%	716,826,500	10%	1,690,632,950	10%	804,340,902	10%	1,291,268,759	10%	1,406,887,381	10%	1,573,668,180
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		50%	463,076,500	50%	228,132,950	55%	659,601,527	60%	1,151,295,690	65%	1,269,008,069	70%	1,444,474,631

Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	n, perkebunan dan Peternakan	AN Indikator: Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian		0		123,500,000		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik LokasiPertanian														
			Indikator: Persentase Penggunaan Sarana Pertanian														
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10 Kec	463,076,500	10 Kec	104,632,950	10 Kec	559,601,527	10 Kec	951,295,690	10 Kec	1,069,008,069	10 Kec	1,244,474,631		
			Indikator: Perluasan Areal Tanam Padi dan Jagung														
			Pengelolaan Sumber Daya	1 jenis	103,750,000	2 jenis	95,000,000	3 jenis	114,384,375	4 jenis	120,103,594	5 jenis	126,108,773	6 jenis	126,108,773		

			Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten /Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SGD Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Kegiatan	0	0	0	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
			Indikator: Jumlah Pengelolaan Sumber Daya	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	103,750,000	4 jenis tanaman	0	4 jenis tanaman	114,384,375	4 jenis tanaman	120,103,594	4 jenis tanaman	126,108,773	4 jenis tanaman	126,108,773
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten /Kota Lain		15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	150,000,000	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	1,367,500,000	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	30,355,000	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	19,869,475	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	11,770,539	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	3,084,776
			Indikator: Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak	Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain Indikator: Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	150,000,000	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	1,367,500,000	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	30,355,000	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	19,869,475	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	11,770,539	15 ekor dan 18500 pohon/ Stek	3,084,776

Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 2: Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PERTANIAN Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan		10%	3,062,500,000	10%	4,780,491,900	10%	4,225,024,730	10%	4,398,775,472	10%	4,726,238,737	10%	4,857,525,899
			Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator: Persentase Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	50%	200,000,000	52%	1,315,116,900	54%	402,003,400	56%	499,178,893	58%	484,796,993	60%	507,929,320
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan / LCP2B Indikator: Tersusunnya Perda Lp2B, KP2B dan LCP2B	n/a	0	3 dokumen	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Indikator: Tersedianya data Lahan Pertanian Yang Berkelanjutan	n/a	0	1 dokumen	47,500,000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0

			1 dokumen	100,0 00,00 0	1 dokumen	1,220, 116,90 0	1 dokumen	350, 000, 000	1 dokumen	441,845 ,165	1 dokumen	424,59 6,579	1 dokumen	444,71 8,885
			1 Tahun	100,0 00,00 0	1 Tahun	47,500 ,000	1 Tahun	52,0 03,4 00	1 Tahun	57,333, 728	1 Tahun	60,200 ,414	1 Tahun	63,210 ,435
		Pembangunan Prasarana Pertanian	57 unit	2,862, 500,0 00	77 unit	3,465, 375,00 0	97 unit	3,82 3,02 1,33 0	117 unit	3,899,5 96,579	137 unit	4,241, 441,74 4	157 unit	4,349, 596,57 9

		Indikator: Jumlah Meningkat nya Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Jaringan Irigasi Usaha TaniIndikato r: tersedianya Prasarana Pertanian	7 unit	837,5 00,00 0	32 unit	2,795, 375,00 0	49 unit	1,79 8,02 1,33 0	67 unit	1,724,5 96,579	82 unit	1,916, 441,74 4	100 unit	1,724, 596,57 9
			Pembanguna n Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Embung Pertanian Indikator: Tersedianya Embung Pertanian dalam Kondisi Baik	1 unit	175,0 00,00 0	4 unit	0	5 unit	175, 000, 000	6 unit	175,000 ,000	7 unit	175,00 0,000	8 unit	175,00 0,000
			Pembanguna n Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Jalan Usaha Tani Indikator: Terbangunny a dan Terehabilita sinya Jalan Usaha Tani dalam Kondisi Baik	40 unit	1,000, 000,0 00	47 unit	370,00 0,000	52 unit	1,00 0,00 0,00 0	58 unit	1,150,0 00,000	65 unit	1,300, 000,00 0	72 unit	1,600, 000,00 0

			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Balai Penyuluh di Kecamatan	10 unit	200,000,000	10 unit		10 unit	200,000,000	10 unit	200,000,000	10 unit	200,000,000	10 unit	200,000,000
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Lainnya Indikator: Terbangun dan Terehabilitasinya Prasarana Lainnya dalam Kondisi Baik	3 unit	200,000,000	3 unit	300,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	200,000,000
Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas	Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas	PROGRAM PENGANALISISAN KESEHATAN		95%	223,250,000	96%	470,000,000	97%	236,250,000	98%	238,612,525	99%	250,543,125	100%	263,070,282
			Penjaminan Kesehatan	6000 ekor	188,250,000	8000 ekor	470,000,000	11000 ekor	236,250,000	14000 ekor	198,095,650	17000 ekor	208,000,406	21000 ekor	218,400,427

s Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Peternakan Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator: Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten / kota Indikator: Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak dan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Indikator: Terlaksananya Vaksinasi, tersedianya Obat-obatan dan Operasional Vaksinasi	10 Kecamatan	188,2 50,000	10 Kecamatan	470,00 0,000	10 Kecamatan	236, 250, 000	10 Kecamatan	198,095 ,650	10 Kecamatan	208,00 0,406	10 Kecamatan	218,40 0,427
			Penerapan dan Pengawasan		100 dokumen	35,00 0,000	110 dokumen	0	120 dokumen	0	130 dokumen	40,516, 875	140 dokumen	42,542 ,719	150 dokumen	44,669 ,855
			Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator: Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator: Terlaksananya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	100 dokumen	35,00 0,000	110 dokumen	0	120 dokumen	0	130 dokumen	40,516, 875	140 dokumen	42,542 ,719	150 dokumen	44,669 ,855

Tujuan 2: Meningkatkan Produktivitas Komoditas Pertanian Indikator: Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Pertanian	Sasaran 4: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Indikator: Meningkatkan Kelas Kemampuan Kelompok Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANI AN Indikator: Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibangun oleh penyuluh		40%	163,750,000	45%	491,375,000	50%	171,937,500	55%	172,134,375	60%	174,378,094	65%	176,606,698
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		25%	163,750,000	27%	491,375,000	30%	171,937,500	34%	172,134,375	39%	174,378,094	45%
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	144 Buku	163,750,000	144 Buku	277,625,000	144 Buku	171,937,500	144 Buku	172,134,375	144 Buku	174,378,094	144 Buku	176,606,698
			Indikator: Persentase Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian Binaan yang Berhasil Meningkatkan Kelas												
			Indikator: Terlaksananya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten												

				Pengembang an Kapasitas Kelembagaa n Petani di Kecamatan Indikator: Terlaksanan ya Kegiatan Penyuluh yang Tepat guna dan Tersusunnya Program Tingkat Desa Kecamatan dan Kabupaten			213,75 0,000								
--	--	--	--	---	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2021



පිළිගිණුකා කූඨආණ්ඩුකම
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
නිකසවිනායුකම්
DINAS PERTANIAN
කෘෂිකර්මාන්වුලය
JALAN GATOT SUBROTO II, NOMOR 1, TELEPON : (0361) 810937
Website: <http://distan.tabanankab.go.id> dan Email: distan@tabanankab.go.id
Sanggulan - Tabanan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. I Nyoman Budana, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Tabanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

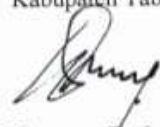
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 31 Januari 2022

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Tabanan,


Ir. I Nyoman Budana, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional /Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Hasil evaluasi Inspektorat	90
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi Inspektorat	79
3.	Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Pertanian	Nilai Produktivitas Komoditas Pertanian	10%
4.	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian Perkebunan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	10%
5.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan Hewan dan jumlah Unit Usaha yang tersertifikasi NKV	96%
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani, subak dan subak Abian yang dibina oleh penyuluh	Jumlah Penyuluh dan petani yang berprestasi	45%

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional /Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Produktivitas Tahun ke-n dikurangi produktivitas Tahun (n-1) dibagi produktivitas Tahun (n-1) dikalikan seratus persen	10%	1.604.632.950
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pendukung pertanian	Jumlah Prasarana Tahun ke-n dikurangi Jumlah Prasarana Tahun (n-1) dibagi Jumlah Prasarana Tahun (n-1) dikali seratus persen	10%	4.429.233.000
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan dan penerapan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan dibagi jumlah Ternak dikalikan seratus persen	96%	350.000.000
4.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok yang dibina oleh penyuluh	Jumlah Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian yang Dibina Oleh Penyuluh dibagi Total Jumlah Kelompok Tani, Subak dan Subak Abian dikalikan seratus persen	45%	221.000.000
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Distan Tabanan)	Jumlah Realisasi Anggaran Dibagi Jumlah Pagu Anggaran dikalikan seratus persen	100 %	30,711,684,223

Pihak Kedua
 ✓ Bupati Tabanan


 Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 31 Januari 2022

Pihak Pertama
 Kepala Dinas Pertanian
 Kabupaten Tabanan,


 Ir. I Nyoman Budana, M.M.

LAMPIRAN TAMBAHAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	Pengolahan Pasca Panen Produk Pertanian dalam Arti Luas yang Bermilai Ekonomi Tinggi	Pengembangan Kawasan Cabe Untuk Menunjang Produk Olahan Cabe Bubuk	Meningkatkan nilai tambah produk hortikultura dengan pengolahan cabe menjadi cabe bubuk	$\text{Cabe Bubuk} : \frac{2,5\% \times \text{Jumlah Produksi}}{10}$	1,7 Ton	
2.	Kinerja Wajib					
2.1	Keterjangkauan Informasi Perangkat Daerah di Media Sosial	Publikasi kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial	Jumlah Unggahan Perbulan	Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah yang diunggah di Media Sosial (facebook dan instagram)	25	
			Jumlah Minimum "Like" pada setiap unggahan	Jumlah "Like" pada setiap Kegiatan Perangkat Daerah yang diunggah di Media Sosial (facebook dan instagram)	30	

1	2	3	4	5	6	7
2.2	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN dibagi jumlah ASN	90%	
2.3	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan No. 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100%	
2.4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	Hijau (81)	

Tabanan, 31 Januari 2022

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan,

Ir. I Nyoman Budana, M.M.

Pihak Kedua

Bupati Tabanan,

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/618/03/HK/2023

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022 kepada Bupati Tabanan sebagai laporan kinerja sebagaimana yang jelas ditetapkan dalam penetapan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Tahun 2022.
- KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor Rekening
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 Pebruari 2023

an. BUPATI TABANAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN,



I MADE SUBAGIA, S.Pi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196603081989031012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian se-Kabupaten Tabanan;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

